

Indeks Kedalaman Kemiskinan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia

Umar Habib¹, Heru Wahyudi²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Lampung^{1,2}

heru.wahyudi@feb.unila.ac.id



Riwayat Artikel

Diterima pada 31 Agustus 2022

Revisi 1 pada 5 September 2022

Revisi 2 pada 19 September 2022

Diterima pada 24 September 2022

Abstract

Purpose: This study aims to determine whether or not there are differences in poverty gap index before and during the COVID-19 pandemic.

Research methodology: The analytical method used is descriptive statistical analysis and proven by the T-test Paired Sample Two Tests for Means, to poverty gap index data (P1) 2018S1-2021S2 in 34 provinces.

Results: The results showed that there were differences in poverty gap index before and during the COVID-19 pandemic. This is indicated by the value of the Paired Two Sample for Means T-test, which has a t-statistic value smaller than t-critical, namely $-5.2028 < 9776$. According to poverty gap index ranking, there are 5 provinces that have the highest poverty gap index in the same order before and during the COVID-19 pandemic, like a Papua, West Papua, Nusa Tenggara, Maluku, and Gorontalo.

Limitations: The limitation in this study is only used statistics descriptive method.

Contribution: The results of this study are expected to be a reference for the government in terms of equitable distribution of social assistance by adding a poverty gap index variable to strengthen the poverty line index variable.

Keywords: Covid-19, Descriptive statistics, Poverty, Poverty gap index

How to cite: Habib, U., & Wahyudi, H. (2022). Indeks Kedalaman Kemiskinan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 59-72.

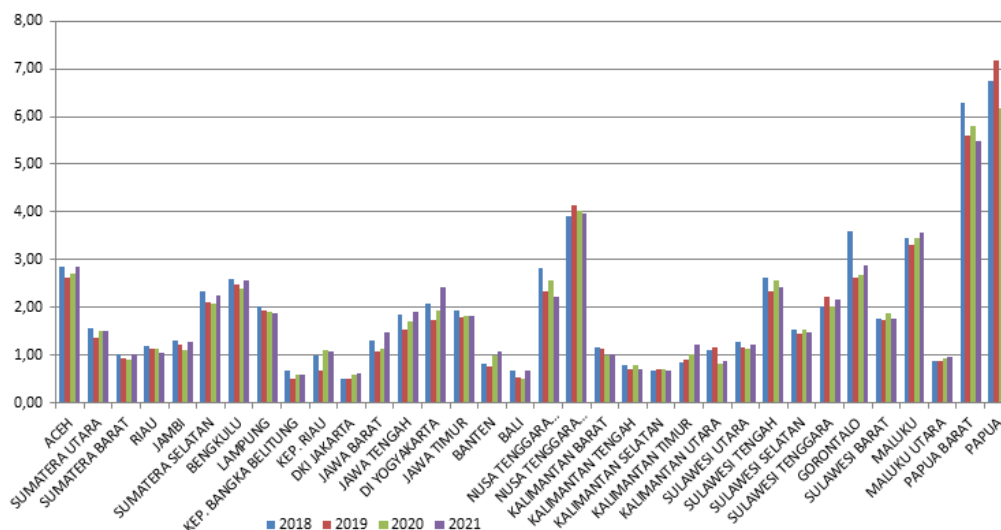
1. Pendahuluan

Suatu proses yang saling keterkaitan dan berkesinambungan pada faktor-faktor yang meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam waktu jangka panjang dapat dikatakan sebagai pembangunan (Arsyad, 2010). Salah satu tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan menurunkan tingkat kemiskinan dan penanggulangan ketimpangan pendapatan dengan pemerataan pendapatan yang diterima penduduk. Kesejahteraan penduduk menjadi tolak ukur utama tingkat kemiskinan artinya bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan maka menggambarkan tingkat kesejahteraan yang semakin memburuk, dan sebaliknya. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Tingkat kemiskinan digunakan sebagai ukuran agregat untuk mengukur tingkat kesejahteraan di suatu wilayah (Todaro & Smith, 2006).

Pertumbuhan ekonomi negara-negara dengan pendapatan tinggi tercatat -5,4 persen pada tahun 2020, adapun pertumbuhan ekonomi Negara sedang berkembang juga mengalami penurunan hingga angka -2,3 persen (IMF, 2021) salah satunya Indonesia akibat adanya pandemi Covid-19. Memperkirakan dampak Covid-19 terhadap kemiskinan perlu meramalkan dampaknya di seluruh distribusi pendapatan atau pengeluaran rumah tangga. Dampak distribusi ini dapat diasumsikan, berdasarkan teori, dipinjam dari konteks lain, atau menerapkan pola historis (Suryahadi et al., 2020). Kemiskinan bukan hanya

sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin namun harus memperhatikan indikator lain yaitu tingkat kedalaman kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.



Gambar 1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2018- 2021 (dalam persen)

Sumber: BPS, 2018 -2021

Gambar 1 menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia pada semester 1 2018-semester 1 2021, pada diagram di atas menunjukkan bahwa Provinsi Papua berada di posisi pertama pada indeks kedalaman kemiskinan dengan nilai indeks kemiskinan sebesar 7,17 Persen. Kemudian posisi kedua yaitu Provinsi Papua Barat dengan nilai indeks kemiskinan 5,60 persen, posisi ketiga yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai 4,14 persen. Terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan kedalaman kemiskinan pada saat pandemi Covid-19, yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Kecenderungan peningkatan ini terjadi pada tahun 2020 dimana rata-rata provinsi di Indonesia mengalami peningkatan (BPS, 2020).

Kemiskinan dilihat segi dari perspektif luas yaitu rendahnya pendapatan, tidak tersedianya akses pengetahuan, sumber daya, layanan sosial, kesehatan yang memadai, serta ketersaingan dalam hal pembangunan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Unsur-unsur tersebut dapat menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat sehingga mengakibatkan kemiskinan (Gemmel, 1992) dan (Sen, 2000).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, indeks kedalaman kemiskinan turun menjadi 1,67 pada September 2021 dari posisi Maret 2021 yang sebesar 1,71. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks kedalaman kemiskinan tertinggi berada di lima provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Aceh.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Teori Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran. Ukuran kemiskinan yaitu menggunakan Garis kemiskinan, yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM), dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang dihasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang dihitung dalam 2.100 kalori perkapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan dihitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*) adalah kemiskinan yang tidak mempunyai ujung dan pangkalnya yang mana semua unsur yang menyebabkan kemiskinan akan saling berhubungan (Nurkse, 1953). Kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan, adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah (Jhingan, 2007). Rendahnya produktivitas akan mengakibatkan pendapatan ikut rendah, rendahnya produktivitas mengakibatkan pendapatan yang diterima rendah, pendapatan yang rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menurun. Jika pendapatan terus menurun mengakibatkan kemiskinan karena modal untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak maksimal.

Indikator Kemiskinan dan ukuran kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Worldbank.

- a. Persentase Penduduk Miskin (*Head Count Index/P0*) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Rumus perhitungannya:

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]_0$$

Dimana :

P_0 = Persentase penduduk miskin

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

n = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) adalah ukuran pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh dibawah rata-rata pengeluaran penduduk terhadap Garis Kemiskinan.

$$P_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]_1$$

Dimana:

P_1 = Indeks kedalaman kemiskinan

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan: $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

Indeks kedalaman kemiskinan dapat diinterpretasikan yaitu penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index/P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^2$$

Dimana:

P2 = Indeks keparahan kemiskinan

z = Garis kemiskinan

yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan: $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

Nilai agregat dari *Poverty Gap Index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin, dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, maka semakin jauh dibawah rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Analisis statistik deskriptif ini sebagai alat analisa yang bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan indeks kedalaman kemiskinan sebelum dan saat pandemi Covid-19. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan *cross section* 34 Provinsi di Indonesia, bersumber dari Badan Pusat Statistik pada periode semester I 2018 sampai semester II 2021, data tersebut yaitu indeks kedalaman kemiskinan. Alat analisis yang digunakan adalah uji normalitas dan uji beda rata-rata dengan *paired sample test* dan

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal digunakan uji Jarque-Bera. Pedoman dalam mengambil keputusan apakah sebuah distribusi data mengikuti distribusi normal adalah (Widarjono, 2017). Asumsi utama yang harus dipenuhi dalam menggunakan uji-t adalah data harus berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal maka menggunakan statistik non parametrik(Nur, 2019).

Uji Beda Rata-rata

Konsep dari uji beda rata-rata adalah membandingkan nilai rata-rata besertaselang kepercayaan tertentu (*confidence interval*) dari dua populasi. Prinsip pengujian dua rata-rata adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Oleh karena itu dalam pengujian ini diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Uji beda rata-rata terdiri dari dua macam yaitu *independent sample 2 test* (uji perbedaan 2 sampel independen) dan *paired sample 2 test* (uji dua sampel berpasangan (Santoso, 2000).

Paired sample 2 test, merupakan uji parametrik yang dapat digunakan pada dua data berpasangan. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Karena berpasangan, maka data dari kedua sampel harus memiliki jumlah yang sama atau berasal dari sumber yang sama.

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan

Perbandingan indeks kedalaman kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu berdasarkan provinsi dan pulau di Indonesia untuk mendapatkan ranking. Penentuan ranking indeks kedalaman kemiskinan berdasarkan nilai rata-rata tertinggi dan terendah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan ringkasan data agar menjadi sebuah ukuran kuantitatif yang dapat mewakili sekian banyak data (Nur, 2019). Ada dua hal yang sering dipertimbangkan dalam penentuan data perwakilan salah satunya yaitu rata-rata(*means*).

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indeks Kedalaman Kemiskinan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia

Statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran dari variabel yang ingin di teliti agar mudah dipahami.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

<i>Sebelum Pandemi Covid-19</i>		<i>Saat Pandemi Covid-19</i>	
Mean	1,874411765	Mean	2,046323529
Standard Error	0,120184397	Standard Error	0,134321332
Median	1,455	Median	1,565
Mode	0,69	Mode	1,14
Standard Deviation	1,401578879	Standard Deviation	1,566442447
Sample Variance	1,964423355	Sample Variance	2,453741939
Kurtosis	3,733127902	Kurtosis	6,039391365
Skewness	1,913625161	Skewness	2,230253128
Range	6,77	Range	9,06
Minimum	0,4	Minimum	0,52
Maximum	7,17	Maximum	9,58
Sum	254,92	Sum	278,3
Count	136	Count	136
Confidence Level(95,0%)	0,237687755	Confidence Level(95,0%)	0,26564626

Sumber: Data Analisis MS. Excel

Berdasarkan Tabel. 2 data yang digunakan adalah data indeks kedalaman kemiskinan sebelum dan saat pandemi Covid-19 yaitu pada 2018 semester I sampai 2021 semester II. Statistik deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan nilai rata-rata (*mean*), standar error, modus, median, standar deviasi, sampel varian, kurtosis, *skewness*, *range*, minimum, maksimum, *count*, dan *confidence level*. Berikut penjelasan dari masing-masing nilai statistik deskriptif.

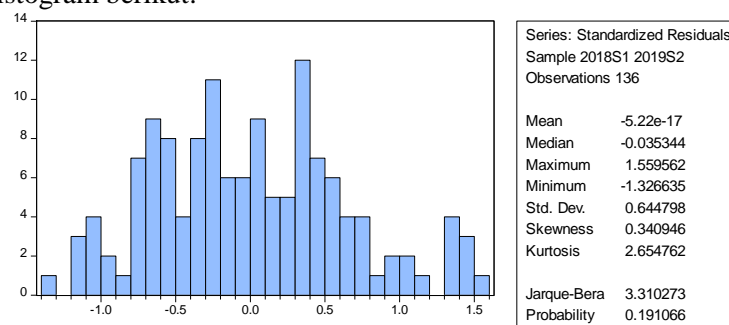
- Data observasi sebesar 136 menghasilkan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan sebelum Covid - 19 sebesar 1,87, sedangkan saat pandemi Covid-19 sebesar 2,04. Rata-rata indeks kedalaman kemiskinan mempunyai selisih sebesar 0,17, lebih besar saat pandemi Covid-19. Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,17 saat pandemi Covid-19. Sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa ada perbedaan indeks kedalaman kemiskinan sebelum dan saat pandemi Covid-19.
- Standar error sebesar sebelum Covid-19 0,120 sedangkan saat pandemi Covid-19 sebesar 0,134, kedua nilai ini menunjukkan bahwa sampel yang di pilih memiliki sebaran yang cukup rendah dibandingkan rata-rata partisipasi.
- Modus, adalah nilai indeks kedalaman kemiskinan yang sering muncul dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,69 dan 0,14. Kedua nilai tersebut adalah nilai indeks yang sering muncul dan biasanya berada di awal baris data.
- Median, adalah nilai tengah dari data yang digunakan, yaitu sebesar 1,455 sebelum pandemi Covid-19 dan 1,565 saat pandemi Covid-19.

- e. Varian Sampel, Nilai ini menunjukkan sampel yang digunakan tersebar cukup dekat dari rata-rata yaitu 1,964 sebelum pandemi Covid-19 dan 2,453 saat pandemi Covid-19.
- f. Kurtosis sebelum pandemi Covid-19 sebesar 3,733 dan saat pandemi Covid-19. Sebesar 6,039391365. Karena nilai kurtosis lebih besar dari tiga, maka sampel yang digunakan memiliki distribusi leptokurtik, semakin besar nilai kurtosis maka kurva semakin runcing.
- g. Skewness sebelum pandemi Covid-19 sebesar 1,913625161 dan saat pandemi Covid-19 sebesar 2,230253128. Karena nilai skewness lebih besar dari nol, dapat disimpulkan sampel yang digunakan cenderung menceng ke kanan.
- h. Range sebesar 6,77 saat pandemi Covid-19 dan sebesar 9,06 saat pandemi Covid-19, nilai ini menunjukkan perbedaan antara jumlah indeks kedalaman kemiskinan tertinggi dan indeks kedalaman kemiskinan terendah di 34 provinsi di Indonesia.
- i. *Minimum* adalah nilai terendah dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,4 sebelum pandemi Covid-19 dan 0,52 saat pandemi Covid-19.
- j. *Maximum* adalah nilai indeks kedalaman kemiskinan tertinggi dalam penelitian ini yaitu sebesar 7,17 sebelum pandemi Covid-19 dan 9,52 saat pandemi Covid-19.
- k. *Sum* adalah jumlah nilai indeks kedalaman kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia, sebelum pandemi Covid-19 sebesar 254,92 dan 278,3 saat pandemi Covid-19.
- l. *Count* adalah jumlah observasi dalam penelitian masing-masing sebesar 136 indeks kedalaman kemiskinan di 34 provinsi Indonesia sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19.

Peningkatan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan saat pandemi Covid-19 berarti semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, maka semakin jauh dibawah rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan, meningkatnya biaya melakukan bisnis di setiap sektor, pengurangan konsumsi karena pergeseran preferensi konsumen atas setiap barang, ketahanan masyarakat terhadap penyakit, dan risikan akan perubahan kondisi ekonomi. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golonganpendapatan menengah ke bawah dan pekerja harian. Kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak termasuk miskin akhirnya menjadi miskin karenpembatasan berskala luas ini (Ahmad, 2021).

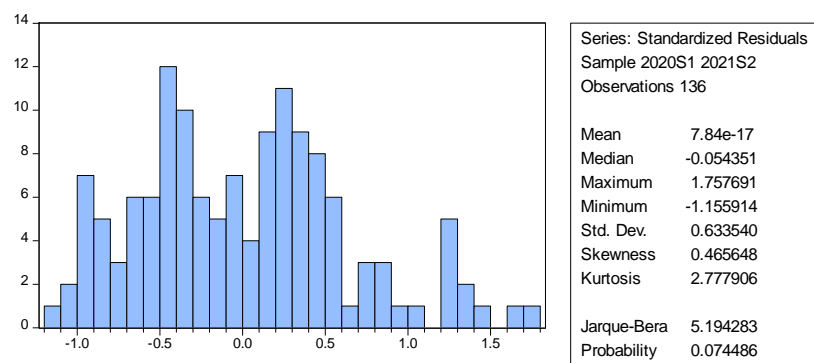
Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Uji Jarque-Bera dengan data log natural (ln), untuk menyederhanakan data tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya. Hasil uji normalitas ditunjukkan oleh histogram berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas sebelum Covid-19

Berdasarkan uji statistik JB, nilai statistiknya sebesar 3,310 sedangkan nilai Chi-squares dengan $\alpha = 5\%$ dan $df = 2$ sebesar 5,9915. Oleh karena itu, menerima H_0 bahwa residual terdistribusi normal. H_0 diterima dapat dilihat dari nilai probabilitas yaitu 0,19 lebih besar dari $\alpha = 5\%$.



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas saat Pandemi Covid-19

Berdasarkan uji statistik JB, nilai statistiknya sebesar 5,194 sedangkan nilai Chi- squares dengan $\alpha=5\%$ dan $df = 2$ sebesar 5,9915. Oleh karena itu, menerima H_0 bahwa residual didistribusikan normal. Menerima H_0 dapat dilihat juga dari nilai probabilitas yaitu 0,0744 lebih besar dari $\alpha = 5\%$.

4.3 Hasil t-Tes Paired Two Sample for Means

T-tes *paired two sample for means* bertujuan untuk membandingkan apakah ada perbedaan indeks kedalaman kemiskinan sebelum dan saat pandemi Covid-19. Data indeks kedalaman kemiskinan yang digunakan yaitu sebelum pandemi Covid-19 pada 2018 Semester I -2019 Semester II dan saat pandemi Covid-19 pada 2020 Semester I sampai 2021 Semester II, masing-masing data berjumlah 136 yang telah di uji dengan *t-Test paired Two Sample for Means* data berpasangan akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. t-Test: Paired Two Sample for Means

t-Test: Paired Two Sample for Means		
	Variable 1	Variable 2
Mean	0,410344026	0,501987086
Variance	0,415764213	0,401372407
Observations	136	136
Pearson Correlation	0,94850916	
Hypothesized Mean Difference	0	
Df	135	
t Stat	-5,202800089	
P(T<=t) one-tail	3,56219E-07	
t Critical one-tail	1,656219133	
P(T<=t) two-tail	7,12437E-07	
t Critical two-tail	1,977692277	

Sumber: Statistik deskriptif, Ms. Excel

Berdasarkan Tabel 3. di atas menunjukkan bahwa nilai t-statistik lebih kecil dari t-critical $-5,2028 < 1,9776$ maka H_0 ditolak, dapat disimpulkan terdapat perbedaan indeks kedalaman kemiskinan sebelum dan saat pandemi Covid-19. Perbedaan ini tercermin dari nilai rata-rata indeks kedalaman kemiskinan sebelum dan saat pandemi Covid-19 mempunyai selisih 0,091 (0,501 - 0,410). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan saat pandemi Covid-19.

Naiknya indeks kedalaman kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi Covid-19 masih belum sesuai jalurnya sehingga belum mampu mengurangi kesenjangan penduduk miskin dari garis kemiskinan (GK). Data indeks tersebut menunjukkan kesenjangan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan semakin melebar dan perlu mendapat tinjauan pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya masyarakat yang butuh bantuan untuk memperkecil jurang atau kesenjangan antara pengeluaran masyarakat yang butuh bantuan dengan garis kemiskinan.

Pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian Tarigan et al., (2020) bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi telah mendorong peningkatan jumlah dan angka kemiskinan, baik secara nasional, wilayah desa-kota, maupun secara pulau-provinsi (Rahayu, 2021).

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, perkembangan kemiskinan (jumlah, kedalaman, keparahan) sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan garis kemiskinan. Garis kemiskinan beranjak lebih sedikit akibat harga-harga yang relatif tidak meningkat. Namun karena pendapatan menurun, daya beli melemah, terlebih lagi masyarakat membutuhkan biaya pengobatan dan tambahan konsumsi vitamin agar memiliki imun tubuh yang mampu bertahan dari pengaruh Covid-19 (Tarigan et al., 2020).

Berdasarkan kondisi saat pandemi Covid-19, berdampak berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan, meningkatnya biaya melakukan bisnis di setiap sektor pengurangan konsumsi karena pergeseran preferensi konsumen atas setiap barang, ketahanan masyarakat terhadap penyakit, dan risiko akan perubahan kondisi ekonomi. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah dan pekerja harian. Kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak termasuk miskin akhirnya menjadi miskin karena pembatasan berskala luas ini (Kurniasih, 2020).

Mengingat sebagian besar dampak Covid-19 terhadap kemiskinan disebabkan oleh pekerja yang kehilangan pekerjaan karena pembatasan yang diberlakukan, upaya efektif untuk menghindari meningkatnya kemiskinan adalah dengan mencegah pekerja dari pemutusan hubungan kerja (Setyadi & Indriyani, 2021).

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Peringkat Indeks Kedalaman Kemiskinan Berdasarkan Provinsi

Berikut ini adalah data peringkat rata-rata indeks kedalaman kemiskinan di 34 Provinsi di Indonesia sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Urutan indeks berdasarkan nilai tertinggi ke terendah.

Tabel 4. Peringkat Rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan

No.	Provinsi	Sebelum	No.	Provinsi	Saat
1	Papua	6,47	1	Papua	6,8
2	Papua Barat	6,01	2	Papua Barat	6,59
3	Nusa Tenggara Timur	4,19	3	Nusa Tenggara Timur	4,52
4	Maluku	3,46	4	Maluku	4,08
5	Gorontalo	2,83	5	Gorontalo	3,3
6	Aceh	2,72	6	Aceh	3,01
7	Sulawesi Tengah	2,61	7	Sulawesi Tengah	2,6
8	Nusa Tenggara Barat	2,41	8	Nusa Tenggara Barat	2,53
9	Bengkulu	2,36	9	Bengkulu	2,47
10	Sumatera Selatan	2,16	10	Sulawesi Tenggara	2,36

11	Sulawesi Tenggara	2,15	11	Sumatera Selatan	2,26
12	Lampung	2,01	12	DI Yogyakarta	2,14
13	Jawa Timur	1,86	13	Lampung	2,01
14	DI Yogyakarta	1,75	14	Jawa Timur	1,95
15	Sulawesi Barat	1,63	15	Sulawesi Barat	1,92
16	Jawa Tengah	1,61	16	Jawa Tengah	1,91
17	Sulawesi Selatan	1,58	17	Sulawesi Selatan	1,68
18	Sumatera Utara	1,47	18	Sumatera Utara	1,54
19	Jambi	1,24	19	Jawa Barat	1,35
20	Sulawesi Utara	1,16	20	Kep. Riau	1,3
21	Jawa Barat	1,15	21	Sulawesi Utara	1,26
22	Kalimantan Barat	1,14	22	Kalimantan Timur	1,16
23	Riau	1,12	23	Riau	1,15
24	Kalimantan Utara	1,07	24	Banten	1,1 5
25	Maluku Utara	1,03	25	Kalimantan Barat	1,1
26	Sumatera Barat	0,93	26	Jambi	1,08
27	Kalimantan Timur	0,88	27	Sumatera Barat	1,03
28	Banten	0,82	28	Maluku Utara	0,98
29	Kep. Riau	0,8	29	Kalimantan Utara	0,91
30	Kalimantan Tengah	0,77	30	Kalimantan Tengah	0,81
31	Kalimantan Selatan	0,7	31	Kalimantan Selatan	0,69
32	Kep. Bangka Belitung	0,63	32	Kep. Bangka Belitung	0,67
33	Bali	0,56	33	Bali	0,67
34	DKI Jakarta	0,48	34	DKI Jakarta	0,63

Sumber: BPS, 2018-2021

Berdasarkan urutan ranking indeks kedalaman di Tabel. 4 menunjukkan bahwa terdapat 5 Provinsi yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan tertinggi dengan urutan sama sebelum dan saat pandemi Covid-19 yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo. Indeks ke 5 provinsi tersebut memiliki rata-rata berkisar dari 2,83–6,80. Meskipun memiliki urutan indeks yang sama sebelum dan saat pandemi Covid-19 provinsi-provinsi tersebut memiliki indeks yang lebih besar saat pandemi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Ferezagia, 2018) Provinsi-provinsi di Indonesia dengan nilai indeks kedalaman kemiskinan 5 tertinggi secara berurutan yaitu PapuaBarat (7,41), Papua (6,25), Nusa Tenggara Timur (4,16), Maluku (3,41) dan Gorontalo (3,31). Hal ini menunjukkan bahwa selama periode 2018-2021 tidak ada perubahan urutan provinsi dengan nilai indeks tertinggi, meskipun nilai indeks tersebut naik atau turun. Selanjutnya pada urutan ke 6-9 yaitu Aceh, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu memiliki rata-rata indeks kedalaman kemiskinan berkisar 2,36–3,01. Semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan suatu provinsi maka semakin tinggi tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Rata-rata indeks kedalaman kemiskinan di 34 Provinsi di Indonesia mengalami peningkatan saat pandemi Covid-19. Meskipun peningkatan yang terjadi tidak signifikan yaitu berkisar dari 0,01 sampai 0,47. Salah satu provinsi yang mengalami penurunan sebesar 0,01 yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah. Adapun provinsi yang memiliki rata-rata indeks kedalaman kemiskinan yang tetap yaitu Provinsi Lampung. Provinsi yang rata-rata indeks kedalaman kemiskinan

terendah sebelum dan saat pandemi Covid-19 yaitu DKI Jakarta, Bali, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kelima provinsi ini memiliki rata-rata indeks kedalaman kemiskinan tidak sampai 1 persen berkisar antara 0,63 – 0,81. Semakin rendah indeks kedalaman kemiskinan suatu provinsi maka semakin rendah tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Terdapat provinsi yang memiliki peningkatan saat pandemi Covid-19 yaitu Sulawesi Tenggara, Di Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Kep. Riau dan Kalimantan Timur, yang sebelumnya memiliki urutan rendah dibandingkan saat pandemi Covid-19. Provinsi Sulawesi Tenggara yang awalnya berada di urutan 11 naik menjadi urutan 10, Di Yogyakarta yang awalnya berada di urutan 14 naik menjadi urutan 12, Jawa Barat yang awalnya berada di urutan 21 naik menjadi urutan 19, Banten yang awalnya berada di urutan 28 naik menjadi urutan 24, Kep. Riau yang awalnya berada di urutan 29 naik menjadi urutan 20 dan Kalimantan Timur yang awalnya berada di urutan 27 naik menjadi urutan 22.

Peringkat Indeks Kedalaman Kemiskinan Berdasarkan Pulau

Pulau Sumatera

Tabel 5. Perbandingan Selisih Indeks Kedalaman Kemiskinan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Pulau Sumatera

Provinsi	Selisih Sebelum Covid-19		Selisih Saat Covid-19	
	2018S2-2018S1	2019S2-2019S1	2020S2-2020S1	2021S2-2021S1
Aceh	-0,05	-0,06	0,13	0,73
Sumatera Utara	-0,10	0,11	0,09	-0,01
Sumatera Barat	-0,08	-0,16	0,07	0,14
Riau	-0,15	-0,02	0,18	0,02
Jambi	-0,04	-0,06	0,08	-0,55
Sumatera Selatan	-0,27	0,02	0,18	0,16
Bengkulu	-0,24	-0,47	0,11	-0,18
Lampung	0,02	0,06	0,21	0,25
Kep. Bangka Belitung	0,04	0,06	0,17	0,10
Kep. Riau	-0,41	0,21	0,10	0,75

Sumber: BPS, 2018-2021

Pada Tabel 5. menunjukkan bahwa selisih semester I dan II 2018 rata-rata indeks kedalaman kemiskinan di Pulau Sumatera cenderung mengalami penurunan, nilai positif dan negatif menunjukkan peningkatan dan penurunan indeks kedalaman kemiskinan, hanya Provinsi Lampung dan Provinsi Kep. Bangka Belitung yang meningkat sebelum Covid-19. Sedangkan pada semester I dan II 2019 terdapat empat provinsi yang mengalami peningkatan indeks kedalaman kemiskinan seperti provinsi Sumatera Utara, Lampung dan Kepulauan Riau. Provinsi Lampung dan Kep. Bangka Belitung tetap mengalami peningkatan sebelum dan saat pandemi Covid-19. Pada semester I dan II tahun 2020-2021 indeks kedalaman kemiskinan memiliki kecenderungan meningkat di beberapa provinsi di Pulau Sumatera. Peningkatan indeks tertinggi berada di Provinsi Bengkulu dari semester I dan II 2018-2020.

Pulau Jawa

Tabel 6. Perbandingan Selisih Indeks Kedalaman Kemiskinan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Pulau Jawa

Provinsi	Selisih Sebelum Covid-19		Selisih Saat Covid-19	
	2018S2-2018S1	2019S2-2019S1	2020S2-2020S1	2021S2-2021S1
DKI Jakarta	-0,01	-0,10	0,08	-0,01

Jawa Barat	-0,19	-0,03	0,15	0,05
Jawa Tengah	-0,22	-0,10	0,12	0,24
Di Yogyakarta	-0,42	-0,20	0,14	-0,31
Jawa Timur	0,12	-0,19	0,15	0,32
Banten	0,09	0,04	0,15	0,27

Sumber: BPS, 2018-2021

Selisih indeks kedalaman kemiskinan mempunyai nilai positif dan negatif menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan indeks, di Pulau Jawa sebelum Covid-19 memiliki kecenderungan indeks kedalaman menurun yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Di Yogyakarta, hanya Provinsi Jawa Timur dan Banten yang mengalami peningkatan pada tahun 2018. Provinsi Banten mengalami peningkatan indeks kedalaman kemiskinan sebelum dan saat pandemi Covid-19. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan terjadi saat pandemi Covid-19 di semua Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2020 dan beberapa provinsi pada 2021 yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten.

Pulau Kalimantan

Tabel 7. Perbandingan Selisih Indeks Kedalaman Kemiskinan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Pulau Kalimantan

Provinsi	Selisih Sebelum Covid-19		Selisih Saat Covid-19	
	2018S2-2018S1	2019S2-2019S1	2020S2-2020S1	2021S2-2021S1
Kalimantan Barat	0,03	-0,12	0,12	0,21
Kalimantan Tengah	0,01	0,06	0,08	0,15
Kalimantan Selatan	0,06	-0,04	0,07	-0,05
Kalimantan Timur	-0,09	0,08	0,01	0,16
Kalimantan Utara	-0,19	-0,04	0,02	0,20

Sumber: BPS, 2018-2021

Perbandingan selisih indeks kedalaman kemiskinan mempunyai nilai positif dan negatif menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan indeks kedalaman kemiskinan di Pulau Kalimantan sebelum adanya Covid-19 memiliki kecenderungan berfluktuasi, sedangkan pada saat Covid-19 tiga provinsi di Pulau Kalimantan mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Utara pada saat Covid-19 yaitu sebesar 0,02 menjadi 0,20 begitupun dengan Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 0,12 yang sebelumnya sebesar 0,12.

Pulau Sulawesi

Tabel 8. Perbandingan Selisih Indeks Kedalaman Kemiskinan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Pulau Sulawesi

Provinsi	Selisih Sebelum Covid-19		Selisih Saat Covid-19	
	2018S2-2018S1	2019S2-2019S1	2020S2-2020S1	2021S2-2021S1
Sulawesi Utara	0,04	-0,29	0,09	0,18
Sulawesi Tengah	-0,36	0,86	0,20	0,16
Sulawesi Selatan	0,13	0,18	0,12	0,54
Sulawesi Tenggara	0,05	0,00	0,19	0,86
Gorontalo	-0,04	-0,03	0,19	1,92
Sulawesi Barat	-0,20	-0,31	0,06	0,31

Sumber: BPS, 2018-2021

Selisih indeks kedalaman kemiskinan Pulau Sulawesi mengalami peningkatan saat pandemi Covid-19 dan beberapa provinsi yang mengalami penurunan sebelum Covid-19. Saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 semua provinsi di Pulau Sulawesi mengalami peningkatan terutama pada tahun 2021. Salah satunya provinsi Gorontalo sebelum dan saat pandemi sebesar -0,03 menjadi 1, 92.

Pulau Bali/Nusa Tenggara

Tabel 9. Perbandingan Selisih Indeks Kedalaman Kemiskinan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Pulau Bali/Nusa Tenggara

Provinsi	Selisih Sebelum Covid-19		Selisih Saat Covid-19	
	2018S2-2018S1	2019S2-2019S1	2020S2-2020S1	2021S2-2021S1
Bali	-0,17	-0,03	0,09	0,20
Nusa Tenggara Barat	-0,44	-0,21	0,16	0,33
Nusa Tenggara Timur	0,64	-0,02	0,14	1,97

Sumber: BPS, 2018-2021

Di Pulau Bali/Nusa Tenggara selisih saat Covid-19 rata-rata indeks kedalaman kemiskinann mengalami peningkatan. Namun pada saat pandemi Covid-19 semua provinsi di Pulau Bali/Nusa Tenggara mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar kembali terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 1,97 yang sebelumnya sebesar -0,14. Hanya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami peningkatan yaitu sebesar sebelum Covid-19. Nilai positif keempat provinsi diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan pada saat pandemic Covid-19.

Pulau Maluku/Papua

Tabel 10. Perbandingan Selisih Indeks Kedalaman Kemiskinan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Pulau Maluku/Papua

Provinsi	Selisih Sebelum Covid-19		Selisih Saat Covid-19	
	2018S2-2018S1	2019S2-2019S1	2020S2-2020S1	2021S2-2021S1
Maluku	-0,16	0,42	0,29	1,94
Maluku Utara	0,36	0,19	0,15	-0,04
Papua Barat	0,21	0,04	-0,30	4,09
Papua	-0,82	-1,10	0,74	2,93

Sumber: BPS, 2018-2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa selisih sebelum dan saat pandemi Covid-19 cenderung meningkat, nilai positif dan negatif menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan . Provinsi Papua Barat dan Papua memiliki peningkatan tertinggi saat pandemi Covid-19 sebesar 4,09 dan 2,93 dibandingkan dengan provinsi lain. Sedangkan provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan sebelum pandemi Covid-19 dan mengalami penurunan saat pandemi Covid-19.

Usaha Pemerintah dalam Menangani Indeks Kedalaman Kemiskinan Saat Pandemi Covid-19

Pemerintah memiliki beberapa usaha untuk melindungi perekonomian rakyat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan pandemi Covid-19 (Sugiarto, 2020). Bersama Kementerian Keuangan pemerintah pusat menciptakan sejumlah skema JPS atau *Social Safety* (BNPB, 2020). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Gambar 4.



Gambar 4. Kebijakan jaringan pengaman sosial pemerintah pusat dalam menghadapi pandemi Covid-19

Sumber: BNPB, 2020

Pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai bentuk dan jenis kebijakan bantuan sosial dalam upaya menyelamatkan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini meliputi (1) Program Keluarga Harapan (PKH), (2) Bantuan Sosial Tunai, (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), (4) Bantuan Sosial Sembako (BSS) untuk Wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), (5) Kartu prakerja, (6) Kartu sembako, dan (7) Subsidi listrik.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan indeks sebelum dan saat pandemi, hasil tersebut sesuai dengan hipotesis hal ini di tunjukkan oleh T-tes *Paired Two Sample for Means* yang memiliki nilai t-statistik lebih kecil dari t-critical yaitu $-5,2028 < 1,9776$. Menurut peringkat indeks kedalaman kemiskinan terdapat 5 provinsi yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan tertinggi dengan urutan sama sebelum dan saat pandemi Covid-19 yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara, Maluku, dan Gorontalo.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Limitasi atau kekurangan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan analisis statistik deskriptif saja.

Ucapan Terima Kasih

Puja dan puji syukur ke Hadirat Allah SWT. yang telah memberikan saya segala kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa ucapan terima kasih kami haturkan dengan tulus kepada kedua orangtua dan teman-temanyang sudah membantudanmendoakan, memberi semangat dan dukungan selama menyelesaikan penelitian ini. Karena tanpa adanya doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan ini akan sulit terselesaikan. Semoga hasil yang didapatkan sebaik kerja keras yang telah saya berikan untuk pembuatan artikel ini. Sekian dan terima kasih.

Referensi

- Adji, A., Hidayat, T., Tuhiman, H., Kurniawati, S., & Maulana, A. (2020). Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan. *Tnp2K*, 1–36.
- Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 17(1), 17–34.
- Ahmad, E. K. (2021). *Penurunan Kesejahteraan Akibat Covid-19*. 1(2), 60–67.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan (Kelima)*. UPP STIM YKPN.

- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Provinsi Aceh 2022*.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Gemmel, N. (1992). *Ilmu Ekonomi Pembangunan, Terjemahan*. Pustaka Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Provinsi Papua 2022*. 7(4).
- Jhingal, M. L. (2007). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo.
- Kurniasih, E. P. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 277–289.
- Nur, D. (2019). *Metodologi Penelitian SDM: Modul 11 Analisis Data*. Universitas Mercu Buana.
- Nurkse, R. (1953). Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. *New York: Oxford University Press*, 163. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(88\)90074-7](https://doi.org/10.1016/0304-4076(88)90074-7)
- Rahayu, E. S. (2021). Dampak Pandemi Covid Terhadap Pendapatan Dan Kemiskinan Rumah Tangga Umkm Di Das Keduang. *Jurnal Ilmiah Management Agribisnis*, Vol. 2 No., 147–154.
- Santoso, S. (2000). *Buku Latihan SPSS: Statistik Parametrik*. ELex Media Komputindo.
- Sen, A. (2000). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Resiko Kemiskinan Di Indonesia. *PARETO : Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 53–66.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty : An Estimation for Indonesia. *SMERU Working Paper*.
- Tarigan, H., Sinaga, J. H., & Rachmawati, R. R. (2020). Dampak pandemi covid-19 terhadap kemiskinan di indonesia. *Pusat Sosial Ekonomi Litbang Pertanian*, 3, 457–479.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga (Kesembilan)*. Erlangga.
- Widarjono, A. (2017). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews (Edisi Keen)*. UPP STIM YKPN.
- World Bank. (2021). *Global Economic Prospect January 2021*.
- World Health Organization. (2020). *Coronavirus disease (COVID-19) pandemic*.